

Siapkan 74 Dapur SPPG untuk Dukong Program Gizi Nasional



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 07/11/2025

Samarinda – Upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi anak sekolah di Samarinda terus diperkuat. Kamis (6/11), Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bugis di Go Mall Samarinda.

Peresmian itu menjadi langkah lanjutan dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI. Nyoto Suwignyo mengapresiasi terhadap kemajuan pesat program dapur SPPG di Samarinda. Dia menyebut, sejak kunjungannya pada April lalu, perkembangan di lapangan sudah sangat signifikan. “April lalu saya ke sini masih belum banyak dapurnya. Sekarang sudah ada 20 dapur yang beroperasi, dan target tahun ini 74 dapur SPPG bisa dibangun di Samarinda. Itu kebahagiaan bagi kami dalam menjalankan program presiden,” ujarnya, Kamis (6/11).

Menurutnya, keberhasilan itu tak lepas dari dukungan kuat pemerintah kota dan optimalisasi aset daerah. “SPPG Samarinda bisa jadi contoh. Pemerintah daerah mampu memanfaatkan BUMD dan aset yang sebelumnya tidak termanfaatkan dengan baik. Kini aset itu produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Dapur yang diresmikan dikelola tenaga profesional di bidang catering, dengan standar higienitas yang ketat. Selain itu, pengelola juga berperan sosial dengan memberikan pelatihan kepada penjamah makanan untuk memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). “Setiap SPPG wajib memiliki sertifikat SLHS agar kualitas dan keamanan pangan terjamin,” tegasnya. Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah strategis untuk memperluas dan memperkuat pelaksanaan MBG, “Karena itu program Pak Presiden, tidak ada pilihan lain selain disukseskan. Kami sudah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG di Samarinda yang bekerja sama dengan semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan BGN,” katanya.

Andi menjelaskan, 20 dapur SPPG saat ini sudah melayani ribuan siswa, dan sisanya tengah dipersiapkan agar dapat memenuhi kebutuhan 135 ribu siswa di seluruh Samarinda. Untuk memastikan efektivitas program, Pemkot juga tengah membangun sistem pemantauan berbasis digital.

“Kami siapkan *digital dashboard* di Diskominfo agar bisa memantau stok bahan pangan di setiap dapur secara *real time*. Masyarakat nantinya juga bisa melihat, misalnya dapur SPPG Bugis punya stok telur berapa, daging berapa. Semua bisa transparan,” terangnya. Meski pelaksanaan berjalan baik, Andi Harun memberi catatan untuk penyempurnaan menu dalam kunjungan ke SD 002 Samarinda Kota. “Tadi kami koreksi soal buah yang disajikan. Harusnya tidak lagi pisang karena sudah mengandung karbohidrat. Sebaiknya diganti buah lain seperti semangka. Tapi secara umum pelaksanaannya lancar, anak-anak senang, dan reponsnya positif,” ucapnya.

Pemkot bersama BGN akan terus memperkuat koordinasi agar seluruh dapur di Samarinda memenuhi standar SLHS. “Itu sudah jadi ketentuan BGN. Semua dapur harus SLHS. Kami akan bantu fasilitasi pelatihannya agar pelaksanaannya sesuai standar nasional,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Siapkan 74 Dapur SPPG untuk Dukung Program Gizi Nasional, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) diatur sebagai berikut:
 - (1) Upaya pemenuhan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
 - (2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
2. Dalam Pasal 146 UU 17/2003 diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan

keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain kewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makanan dan minuman yang diproduksi, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.